

Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar

Ariana¹, Sukri², Dian Ekawaty³

¹Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

²Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Email: sukripol@gmail.com

³Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

ARTICLE INFO

Keywords: *Political Preference, First-time Voters, Social Media, Senior High School*

Kata kunci: *Preferensi Politik, Pemilih Pemula, Media Sosial, Sekolah Menengah Atas*

How to cite:

Ariana, Sukri, & Ekawaty, D. (2021). *Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar*. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 7(1), 65-80.

ABSTRACT

This paper aims to show how the formation of political preferences of first-time voters occurs. As a factor that influences political behavior, the understanding of political preferences becomes important thinking of a person or community, including the first-time voters. As one of the important segments in political dynamics, first-time voter existence is always an interesting aspect to be examined, including their existence as people who are about to exercise their voting rights for the first time. So far, the first-time voters have tended to be seen as a segment that seems simply to understand their political behavior tendencies due to assumed it is often reflecting the political attitudes of their parents or family. However, since the emergence of social media, there has been a tendency of shifted related to their forming political preferences. Based on research conducted in the City of Makassar towards students in several high schools as first-time voters, this paper aims to show how the actual role of schools, parents, and social media roles in shaping their political preferences that shaping the tendency of their political behavior.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pembentukan preferensi politik bagi pemilih pemula terjadi. Sebagai factor yang mempengaruhi perilaku dan pilihan sikap politik seseorang maka pemahaman terhadap preferensi politik menempati posisi penting dalam upaya memahami perilaku politik seseorang atau suatu komunitas termasuk para pemilih pemula. Sebagai salah satu segmen penting dalam dinamika politik, keberadaan mereka senantiasa menjadi aspek penting yang perlu dicermati, termasuk pada eksistensi mereka sebagai orang yang baru akan pertama kali menggunakan hak pilihnya proses pemilu. Selama ini pemilih pemula cenderung dipandang sebagi segmen yang nampaknya cukup mudah untuk dipahami kecenderungan perilaku politiknya karena diasumsikan preferensi politiknya sering merefleksikan sikap politik orang tua atau keluarga. Namun sejak kemunculan media sosial, terdapat kecederungan pergeseran dinamika pembentukan prefrensi politik di kalangan pemilih pemula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Makassar terhadap segmen pemilih pemula yang terhadap pelajar pada beberapa sekolah menengah atas, tulisan ini mencoba menunjukkan bagaimana sebenarnya peran sekolah, orang tua, media sosial dalam membentuk preferensi politik pemilih pemula yang

merupakan aspek mendasar dalam membentuk kecenderungan perilaku politiknya.

Pendahuluan

Demokrasi adalah suatu yang hal penting karena merupakan gagasan politik yang mengandung nilai-nilai yang sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain demokrasi dipandang sangat penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan perwujudan bersama masyarakat atau pemerintah yang baik.

Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemeritahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Demokrasi dipahami sebagai system yang menjadikan rakyat sebagai aspek terpentingnya. Hal ini kemudian dipahami sebagai aspek kebaikan demokrasi yang berupaya untuk menjaga agar rakyat tidak berada dalam posisi tertindas dalam suatu sistem kehidupan bersama.

Ide tentang tentang kebaikan demokrasi tersebut menjadikan banyak negara berlomba-lomba untuk menyatakan diri sebagai negara yang menganut paham demokrasi. Indikasinya adalah adanya kecenderungan bahwa sebagian besar negara di dunia seolah berupaya untuk dapat dikategorikan sebagai negara yang mengadopsi sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan mereka sehingga dapat dikategorikan sebagai negara dengan sistem demokrasi (Sen 1999:10). Ide tentang demokrasi nampak menjadi tawaran terbaik yang bersifat universal bagi suatu negara untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Hal ini menjadikan demokrasi seolah menjadi sebuah indikator perkembangan politik suatu Negara dimana semua orang (rakyat) memiliki hak yang sama untuk memerintah dan diperintah. Dengan demikian keterlibatan rakyat menjadi aspek terpenting yang akan menentukan derajat sistem demokrasi yang ada pada suatu negara. Demokrasi dipahami sebagai cita-cita atau prinsip yang memandang masyarakat dalam posisi yang setara (Dahl, 1989). Dengan demikian semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam ruang politik. Pada dasarnya masyarakat tidak berkewajiban untuk berpartisipasi tetapi, masyarakat berkewajiban untuk mematuhi setiap keputusan yang telah diambil (Somerville 2011). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap elemen yang ada dalam masyarakat berpotensi untuk berpartisipasi secara berbeda tetapi tetap dilakukan secara bersama sebagai penopang demokrasi tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah kalangan remaja atau para pemilih pemula.

Pemilih pemula pada dasarnya merupakan salah satu segmen penting dalam konteks demokrasi dan mendapat perhatian cukup penting terkait dengan kecenderungan perilaku politiknya (Somerville 2011). Hal ini nampaknya sangat terkait dengan adanya anggapan bahwa kalangan ini kurang mendapat informasi tentang bagaimana sistem politik bekerja dalam konteks demokrasi. Selain itu, kalangan pemilih pemula cenderung dianggap sebagai segmen yang secara politik belum benar-benar bertindak secara independent terkait dengan partisipasinya

dalam sistem demokrasi. Hal ini nampaknya terkait dengan tingkat pemahaman dan preferensi politik yang dimiliki sebagai faktor yang mestinya menjadi dasar bagi perilaku politik dan partisipasinya dalam politik.

Kondisi tersebut cenderung terkait dengan konseptualisasi pemula yang terkait dengan segmen pemuda atau masyarakat usia muda. Segmen ini cenderung dilihat dalam "ruang" yang sama terkait dengan adanya ketergantungan dan derajat kemandirian terhadap berbagai aspek kehidupan, kelompok atau orang. Artinya, ketika segmen ini pada konteks demokrasi dipandang memegang peran penting sebagai bagian dari konsepsi rakyat, namun pada saat bersamaan, hal tersebut nampaknya tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa mereka masih memiliki ketergantungan pada konteks sosial dimana mereka berada. Artinya peran-peran mereka nampaknya masih sangat bergantung pada ruang tempat mereka berekspresi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi segmen ini pada ruang politik dalam sistem demokrasi akan dipengaruhi oleh lingkungan dan tingkat independensinya terkait pemahamannya atas politik (Galstyan, 2019). Artinya segmen pemilih pemula masih cukup bergantung pada aspek lain di luar dirinya dalam membentuk preferensinya atas politik sebagai suatu alasan dalam berpartisipasi dalam event-event demokrasi. Kondisi ini yang menjadikan segmen ini sering terabaikan dan cenderung dianggap masih sangat bergantung pada faktor lain di luar dirinya terutama pada para orang tua sebagai faktor pembentuk preferensi politiknya. Akibatnya, perilaku maupun pandangan politik generasi muda termasuk para pemilih pemula seringkali dianggap sebagai perwujudan dari sikap orang tua. Namun ternyata kondisi tersebut nampaknya mengalami pergeseran terutama terkait dengan bagaimana preferensi politik mereka terbentuk sebagai landasan awal pada perilaku politiknya.

Pemilih pemula penting untuk mendapatkan perhatian dalam sistem politik tidak hanya karena factor pembentuk preferensi politiknya tetapi juga terkait dengan jumlah mereka yang cukup besar di setiap wilayah, salah satunya adalah di Kota Makassar. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 5.035.887 (Andayani, 2019) orang pemilih pemula yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dari jumlah itu terdapat 50.497 jiwa pemilih pemula yang berusia 17 tahun di Sulawesi Selatan. Sedangkan data pada tahun 2020 terdapat 14.030 orang pemilih pemula yang memiliki hak suara untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Makassar. Selain itu, pemilih pemula merupakan bagian penting yang akan melanjutkan sistem demokrasi yang sedang berlangsung saat ini.

Berdasarkan hal ini kemudian pemilih pemula penting untuk mendapatkan perhatian dalam konteks demokrasi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat utamanya pemilih pemula sebagai segmen dalam sistem demokrasi dilakukan dengan berbagai media salah satunya dengan kebijakan Pendidikan. Kebijakan Pendidikan pemerintah yang terkait dengan pemilih pemula adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pemilih pemula diharapkan akan memiliki kesadaran tentang kohesi social dan menyadari arti pentingnya dalam dinamika politik yang

demokratis yang tertuang dalam materi pembelajaran dalam mata pelajaran tersebut.

Kecenderungan pemilih pemula yang diyakini saat ini tidak nampak secara dominan dalam kecenderungan pemilih pemula di Kota Makassar. Pemilih pemula di Kota Makassar tidak lagi menempatkan orang tua sebagai factor pembentuk preferensi politiknya yang utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada segmen pemuda yang merupakan pemilih pemula di Kota Makassar, menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berimplikasi pada pembentukan preferensi politik pemilih pemula. Sehingga preferensi politik pemilih pemula tidak lagi menempatkan orang tua sebagai factor pembentuk utamanya.

Kajian Literatur

Teori Budaya dan Preferensi Politik

Pada dasarnya beberapa kebutuhan manusia secara umum sama meski berbeda tempat dan waktu. Kebutuhan tersebut terkait dengan upaya untuk menjalani kehidupan, kebutuhan untuk berinteraksi secara sosial, kebutuhan akan pengetahuan dan pembelajaran, kebutuhan normatif dan ekspresi metafisik serta kebutuhan akan manifestasi estetika (Serrat, 2010). Oleh karena itu, dalam ilmu sosial, derajat penggabungan dalam kehidupan kelompok dan sampai pada konteks kode intersubjektif menjadi penting untuk diamati. Hal tersebut akan menjelaskan kategori budaya yang lebih baik dalam memperhitungkan preferensi politik (Wildavsky, 1987).

Dalam konteks budaya, aspek individualitas dan aspek kelompok dalam konteks egaliter memiliki peran pentingnya masing-masing. Budaya yang individualistis lebih menyukai otoritas minimal, keberadaan perangkat aturan diterima dalam konteks yang ingin diterima. Artinya tidak semua otoritas akan diterima karena sebagian lagi mungkin akan cenderung ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan konteks individu. Adapun dalam konteks budaya yang egaliter, terdapat perasaan sebagai bagian dari kelompok tertentu dimana individu cenderung terikat pada keputusan kelompok. Dalam konteks pemuda, terdapat perbedaan kritis dalam keterikatan kelompoknya, dimana kebebasan untuk mengekspresikan diri seringkali akan terkait dengan persetujuan orang dewasa. Hal ini kemudian membentuk perbedaan yang cukup signifikan pada pembentukan preferensi politik (Wildavsky 1987). Hal ini sangat terkait dengan adanya pengaruh orang dewasa pada bentuk preferensi yang dianggap tepat atau normal bagi kalangan pemuda. Dengan demikian, dalam konteks preferensi yang bersifat pribadi pemuda cenderung memiliki preferensi yang kabur dalam kaitan dengan kecenderungan preferensi umum yang sangat dekat dengan dominasi preferensi orang dewasa. Dalam hal preferensi terkait dengan sikap-sikap yang lebih besar atas eksistensi negara maka preferensi pemuda cenderung berada di bawah pengaruh preferensi orang dewasa.

Pada awalnya, terdapat suatu kepentingan dimana fakta psikologis yang terbentuk sepenuhnya terbukti dengan sendirinya dan menjelaskan diri sendiri. Artinya jika seorang individu ingin mengetahui apa yang dibutuhkannya maka hal tersebut bisa datang dari persepsi inderanya secara langsung. Dalam hal ini individu, nampaknya menilai situasi dengan membedakan kepentingan yang berlawanan. Individu cenderung memisahkan kepentingan orang lain dari kepentingan diri sendiri, atau jika harus memilih maka mereka cenderung akan memilih berdasarkan aspek diri sendiri. (Wildavsky 1987). Berdasarkan pemahaman tersebut penelitian ini menganalisa pembentukan preferensi politik pemilih pemula.

Preferensi politik pada dasarnya merupakan pilihan tindakan yang berdasarkan pada rangkaian nilai tertentu yang diyakini sebagai dasar dalam menunjukkan perilaku maupun respon politik (Greenstein, 1975). Hal ini yang kemudian nantinya akan membentuk tindakan politik seseorang. Preferensi ini dibentuk melalui rangkaian pengetahuan dan informasi yang diterima oleh seseorang yang kemudian diyakini sebagai alasan mendasar bagi perilaku politiknya. Dalam hal pembentukan preferensi, lingkungan menjadi sebuah variable stimulus yang dapat melahirkan respons individu. Dimana lingkungan dapat membentuk struktur kognisi dan afeksi politik mereka yang pada akhirnya di respons dalam bentuk tindakan. Oleh karenanya, dengan memahami kondisi disekitar individu maka kecenderungan pembentukan preferensi politik seseorang dapat dipahami. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori budaya (cultural theory).

Secara umum teori ini menjelaskan proses pembentukan melalui sumber-sumber informasi yang memungkinkan dan berada di sekitar kehidupan pemilih pemula. Melalui berbagai informasi ini kemudian pemilih pemula kemudian menetapkan atau memilih yang dirasakan paling tepat dan cocok berdasarkan kepentingannya dengan memisahkan kepentingan orang lain dari kepentingannya meski pengaruh aspek luar dirinya menjadi penting.

Kebijakan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula

Berdasarkan Kurikulum Pendidikan yang ada saat ini, pengenalan pemilih pemula terhadap politik utamanya diperoleh melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Pendidikan tersebut mengacu pada visi dan misi pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan hal ini maka proses pendidikan salah satunya diharapkan akan mengembangkan kesadaran warga negara yang demokratis, yang menyadari hak dan kewajiban. Hal ini karena Pendidikan Kewarganegaraan membawa misi

terkait dengan aspek pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Melalui visi Pendidikan Kewarganegaraan, proses ini berupaya mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu, sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan membentuk Negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan karakter positif sebagai makhluk individu dan makhluk sosial secara seimbang (Azmi, 2016). Artinya sejak awal, sebagai sebuah proses pendidikan politik, hal terpenting yang didapatkan para pemilih pemula adalah adanya konsepsi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini mengarah pada keharusan untuk dapat menyikapi hak dan kewajiban sebagai dimensi yang membutuhkan tanggungjawab dan sikap yang tepat dalam mewujudkannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemahaman yang tepat terkait eksistensi masyarakat dalam hal ini pemilih pemula untuk dapat bersikap secara tepat sebagai bagian dari warga negara dalam mewujudkan tatanan masyarakat demokratis.

Dengan demikian pemilih pemula sebagai bagian di dalamnya dituntut untuk meletakkan dimensi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia. Dimensi manusia tersebut secara konsisten diperjelas dan dipertajam di dalam memandang dirinya sendiri dengan potensi diri pribadi, dan pengembangan kerjasama dengan orang lain untuk membawa keunggulan bangsa dan negara, serta kepatuhannya terhadap norma-norma dalam masyarakat, dan aktualiasi dirinya untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal itulah merupakan beberapa materi Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, disamping materi lainnya (Azmi 2016).

Hary Priyatno (2018) menyatakan bahwa kebijakan public memainkan peranan yang penting dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan public kemudian mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Kebijakan Pendidikan merupakan salah satu bagian dalam kebijakan public. Kebijakan Pendidikan terkait dengan peranan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah lebih dulu diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya adalah Asmika Rahman (2018) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan penting untuk memberikan pemahaman awal terkait politik kepada pemilih pemula dan bagaimana seharusnya masyarakat dalam hal ini pemilih pemula berpartisipasi dalam sistem politik. Penelitian lainnya terkait Kebijakan Pendidikan adalah penelitian oleh Hemafitria dan Hadi Rianto (2015) yang menyatakan bahwa sekolah melalui Pendidikan Kewarganegaraan telah memberikan pemahaman dan arahan terkait dengan partisipasi pemilih pemula sebagai warga negara. Proses pembelajaran yang dilakukan memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Penelitian terkait peranan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari kebijakan Pendidikan pemerintah dilakukan oleh Siti Nurlaela Hidayati dan Triwahyuningsih pada tahun 2014 di Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam upaya menumbuhkan budaya politik para siswa SMA (pemilih pemula). Beberapa hal yang menjadi temuannya terkait budaya politik dan Pendidikan Kewarganegaraan terkait dengan civic knowledge, civic disposition, dan civic skill.

Penelitian ini kemudian melihat Kebijakan Pendidikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam sisi yang berbeda. Penelitian ini melihat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan telah berkontribusi pada upaya untuk menciptakan independensi dari pemilih pemula yang pada akhirnya akan berimplikasi pada preferensi politik pemilih pemula terkait keikutsertaannya dalam sistem demokrasi. Jika selama ini penelitian yang ada terkait Kebijakan Pendidikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dikaitkan dengan partisipasi, budaya politik ataupun perilaku politik pemilih pemula. Maka penelitian ini yang akan melihat lebih ke belakang awal dari partisipasi, perilaku dan budaya politik yang diperlihatkan pemilih pemula dengan mengetahui faktor pembentuk preferensi politiknya terlebih dahulu.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitis pada segmen pemilih pemula di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tahun periode bulan Juli sampai September 2020 yang ditujukan kepada siswa-siswa di sembilan sekolah menengah atas yang termasuk dalam kategori pemilih pemula. Informan dalam penelitian ini ditentukan sejak awal berdasarkan pada kategorisasi pada status sekolah. Dalam penelitian ini terdapat 45 informan yang diwawancarai secara mendalam yang berasal dari para pengurus organisasi intra sekolah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Dalam konteks ini, pertama kali seseorang akan memilih adalah ketika telah mencapai usia 17 tahun atau pernah menikah. Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini fokus terhadap pemilih pemula berdasarkan usia.

Siklus pemilu di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali, sehingga kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pemilih pemula merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon atau cakrawala yang luas di antara masyarakat. Selain, jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Dengan demikian, kehadiran mereka dalam ruang partisipasi politik menjadi sangat penting dalam mendukung nilai-nilai demokrasi. Hal ini kemudian meminta adanya pemahaman yang baik dari para pemilih pemula terhadap ruang politik dan bagaimana mereka menempatkan diri di dalamnya.

Selama ini terdapat kecenderungan bahwa pemahaman politik awal dari para pemilih pemula didapatkan dari lingkungan keluarga terutama dari para orang tua. Hal ini kemudian mendorong anggapan bahwa preferensi politik pemula akan sejalan dengan preferensi politik orang tuanya (Lihat misalnya Hooghe and Bădescu 2007; McIntosh et.al. 2007). Dengan demikian, akan mudah untuk memahami preferensi politik pemilih pemula dalam menunjukkan perilaku politiknya. Lebih jauh, kecenderungan perilaku politik segmen ini juga akan dapat diprediksikan sejak awal. Namun kecenderungan tersebut nampaknya menunjukkan adanya perubahan dewasa ini. Segmen ini menunjukkan kecenderungan adanya upaya untuk menolak cara-cara tradisional pada konteks pengetahuan dan partisipasi mereka dalam politik. Hal ini cenderung menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran cara pandang mereka terhadap model pembentukan preferensi yang selama ini cenderung didominasi oleh informasi dan pembenaran dari orang tua.

Para pemilih pemula nampaknya menunjukkan gejala pergeseran dalam model pembentukan preferensi terhadap politik. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara dengan salah satu informan yang menyatakan bahwa:

“Lingkungan sekolah cukup memberikan pengaruh pada awal mengenal politik. Karena di sekolah juga terkadang membahas politik, khususnya pada mata pelajaran PKN. Seperti materi yang terakhir dijelaskan oleh guru, yaitu mengenai politik luar negeri. Selain itu, terkadang mendengar orang tua membahas mengenai politik ketika menjelang pemilihan” (Fau 2020).

"... di sekolah terdapat pelajaran PKN yang beberapa materinya membahas mengenai politik sehingga dengan mempelajarinya atau mendengar penjelasan dari guru mata pelajaran tersebut saya menjadi lebih tahu tentang politik di Indonesia" (And 2020)

"Kenal politik dari lingkungan sekolah karena di sekolah terdapat pelajaran PKN yang dimana guru dari mata pelajaran tersebut terkadang menjelaskan mengenai politik yang berhubungan dengan materi pembelajaran seperti mengenai pemilu, dll." (Nur 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan nampak bahwa proses pendidikan di sekolah melalui Pendidikan Kewarganegaraan telah dapat memberikan pengetahuan kepada para siswa (pemilih pemula) baik pada fase awal mengenal politik ataupun pada tahap pengembangan pengetahuan mereka terkait politik. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan kebijakan Pendidikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memberikan pemahaman awal terkait politik kepada para pemilih pemula. Bagi kalangan pemilih pemula, selain keluarga, dua ruang yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan Pendidikan politik yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh pada preferensi politiknya adalah ruang pembelajaran di sekolah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dan media sosial.

Kenyataan bahwa politik ada diberbagai aspek kehidupan masyarakat maka dinamika politik yang terjadi dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Meski demikian, pendidikan politik tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya kegiatan yang terjadi secara konkret pada berbagai ruang yang memungkinkan di masyarakat. Menurut Kuntowijoyo (1994) bentuk pendidikan politik dapat terdiri atas (1) pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi pada lembaga-lembaga atau proses formal, (2) pendidikan politik yang dilakukan secara non-formal yang merupakan proses yang berlangsung dalam kehidupan keseharian masyarakat di luar mekanisme formal.

Melalui PKN sebagai dasar pengetahuan dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler tambahan seperti organisasi intra sekolah, para pemilih pemula memiliki ruang pengembangan awal dalam bersentuhan dengan pemahaman politik dasar. Hal ini terlihat dari aktivitas mereka di organisasi intra sekolah

"...lingkungan organisasi di sekolah memberi pengaruh pada awal mengenal politik sebagai salah satu pengurus inti dari Osis SMA Negeri 1 Makassar, dalam organisasi tersebut dilatih untuk menyampaikan aspirasi, menentukan pilihan atau membuat suatu keputusan, dan juga diajar untuk memilah mana sisi baik dan yang mana sisi buruk, agar tidak mudah ikut arus." (Dev 2020).

Meski demikian, apa yang didapatkan pada materi pembelajaran PKN nampaknya masih memberikan gambaran umum yang masih membutuhkan tambahan informasi agar dapat menjadi faktor pembentuk utama bagi preferensi pemilih pemula.

"...PKN juga berkaitan dengan politik. Selain itu, saya juga terkadang bertanya kepada orang tua apabila penasaran dengan isu-isu politik yang berkembang ataupun dengan mencari sendiri di internet mengenai isu tersebut, utamanya jika penjelasan orang tua yang belum mampu menjawab keingintahuan saya." (Far 2020)

Berdasarkan interview yang dilakukan terlihat bahwa para pemilih pemula telah memiliki rasa keingintahuan terkait kehidupan politik yang hal ini kemudian mendorong mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh dari sumber-sumber lain. Hal ini terutama untuk dijadikan sebagai standar atau alasan pembenar dari keyakinan atau pemahaman dasar mereka tentang bagaimana mereka memposisikan diri dalam konteks politik yang lebih praktis. Kondisi tersebut sangat terkait dengan kenyataan bahwa unsur fundamental politik tidak hanya pada kesadaran akan eksistensi sebagai warga negara, namun mencakup berbagai kegiatan praksis sebagai bagian dari perwujudannya.

Politik mencakup proses pemerintahan yang interaktif secara kolektif masyarakat dan membuat keputusan untuk kesejahteraan bersama. Artinya politik mempengaruhi kehidupan setiap individu dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penting bagi para pemilih pemula untuk memiliki informasi yang lebih jauh lagi baik untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik-praktik politik yang lebih praksis maupun untuk mengkonfirmasi pemahaman-pemahaman dasar yang mereka miliki dan dapatkan dari sekolah. Salah satu yang kemudian menjadi sumber referensi utama pemilih pemula adalah media. Dalam hal ini media terutama terkait dengan media sosial.

"...media sosial cukup mempengaruhi pada awal mengenal politik, karena banyaknya orang-orang di media sosial yang terkadang membicarakan isu-isu politik." (Flo 2020)

"...bertanya kepada keluarga apabila melihat atau mendengar isu-isu politik. Namun, apabila jawaban yang diberikan dari keluarga belum cukup jelas, maka akan mencari tahu hal tersebut melalui internet atau sosial media" (Naw 2020).

Dewasa ini media sosial berdampak signifikan pada hampir semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan politik. Politisi menggunakan sosial media sebagai alat yang efektif untuk menjangkau calon pemilih dengan pesan kampanye politik, pada saat bersamaan warga menggunakan media sosial untuk mengakses informasi politik, serta mengikuti perkembangan politik terbaru serta terlibat dalam berbagai proses di dalamnya (Mhlomi and Oluyinka 2017). Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan media sosial dalam memberikan informasi serta ruang partisipasi bagi masyarakat termasuk para pemilih pemula. Dewasa ini semakin banyak anak muda yang menggunakan media sosial untuk politik dan menjadi populer di banyak negara. Para pemilih pemula mungkin tidak berpartisipasi aktif dalam arus utama politik ada kecenderungan mereka berpartisipasi pada politik cara yang berbeda (Mhlomi and Oluyinka 2017).

Pentingnya keberadaan media sosial dianggap memberikan ruang alternatif yang melengkapi model partisipasi politik tradisional dari para pemilih termasuk pemilih pemula. Dengan demikian, media sosial tidak menggantikan apa yang selama ini ada, namun hanya memberikan ruang tawaran baru. Meskipun ada beberapa pengecualian penting terkait dengan pemanfaatan media sosial, namun dalam hal pemilih pemula, media sosial telah menjadi alternatif penting bagi upaya partisipasi politik mereka (Mhlomi and Oluyinka 2017). Dalam pemahaman tersebut, media sosial telah menjadi sebuah aspek penting dalam upaya pembentukan preferensi politik pemilih pemula.

Dalam hal ini, media sosial telah memungkinkan pemilih pemula untuk terlibat dengan ruang politik praktis dengan terlebih dahulu mendapatkan berbagai informasi yang melengkapi pemahaman dasar yang didapatkan dari sekolah. Dengan demikian, perkembangan pemahaman mereka mendapatkan penguatan dari informasi yang mereka dapatkan dari media sosial. Hal ini juga menjadi penting karena media sosial juga memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan pandangan mereka dan opini mereka untuk mendapatkan tanggapan atau untuk mencermati ketepatannya pada konteks dengan melihat sikap pro dan kontra terhadap pandangan mereka tersebut.

"...mengenai isu-isu politik yang sedang ramai dibicarakan, akan mencari hal tersebut di internet seperti dengan menonton Youtube, atau membaca komentar-komentar netizen di berita-berita online" (Hal 2020).

Berdasarkan hal tersebut para pemilih pemula kemudian memiliki dasar untuk menetapkan informasi yang diterima sebagai suatu yang tepat bagi konstruksi preferensi politik mereka. Melalui proses ini, para pemilih pemula mendapatkan ruang baru yang bersifat dua arah dalam upaya pengembangan sikap politik mereka. Jika sebelumnya peran orang tua menjadi aspek utama dalam memberikan warna pada preferensi dan sikap politik mereka, namun perkembangan yang ada di sekitarnya melalui perkembangan budaya terkait kehadiran media sosial ternyata telah memberikan input dan pengaruh terhadap konstruksi penyikapan mereka (Sukri et.al 2021). Dalam hal ini, sebagian besar informan memandang bahwa media sosial berkontribusi dalam memfasilitasi upaya mereka untuk lebih mempertajam pemahaman atas politik serta berbagi konsekuensi mereka sebagai warga negara. Hal Ini sebagian disebabkan oleh banyaknya informasi yang berkembang di sekitar lingkungan kehidupan mereka yang dipotret oleh media sosial yang menjadi sesuatu yang sangat dicari pemilih pemula untuk mengkonfirmasi pemahaman dasarnya.

Jika selama ini orang tua berperan menjadi ruang konfirmasi bagi pemilih pemula, maka kehadiran media sosial nampaknya telah membawa adanya pergeseran faktor yang memberi pengaruh dari orang tua kepada media sosial. Memang hasil ini menunjukkan bahwa ada pergeseran namun, media sosial tidak menggantikan posisi orang tua sepenuhnya. Namun pergeseran tersebut kemudian menyebabkan kecenderungan perilaku dan sikap politik pemilih pemula menjadi lebih variative dan bahkan tidak jarang berbeda dengan orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang bukan hanya

sebagai ruang ekspresi pada konteks kehidupan sosial para remaja, namun pada konteks politik sebagai pemilih pemula, media sosial telah menjadi factor penting pembentukan preferensi politik pemilih pemula. Hal ini nampaknya memang sangat terkait dengan semakin krusialnya peran media termasuk dalam politik jika dibandingkan beberapa tahun terakhir (Mahmood and Awan 2019). Jika sebelumnya media cetak dan elektronik mendominasi ruang sosialisasi dan kampanye politik, namun sejak era media sosial yang didorong oleh kemunculan Facebook, Twitter, Instragram, Whatsapp dan platform lainnya, dinamika lintas informasi dalam ranah politik menjadi lebih massif. Media sosial mengubah konsep kampanye politik termasuk di dalamnya bagaimana informasi politik tersedia dan dapat diakses dengan lebih mudah. Hal ini kemudian memberikan ruang bagi para pemuda termasuk para pemilih pemula untuk mendapatkan berbagai informasi politik secara lebih cepat dan mudah baik pada level local, nasional bahkan internasional.

Media Sosial telah memungkinkan para pemilih pemula untuk berbagi ide, mengunggah video dan mengomentari berbagai pandangan dengan bebas tentang berbagai ide, pemikiran maupun pertanyaan-pertanyaan yang belum mereka temukan jawabannya terkait aspek politik. hal ini kemudian berimplikasi pada informasi yang diperoleh yang dapat membentuk variasi preferensi pemilih pemula. Variasi-variasi prefrensi tersebut yang kemudian memunculkan beragam kecenderungan dalam perilaku politik pemilih pemula. Paling tidak kemudahan dan dinamika informasi yang sangat cepat melalui media sosial telah memungkinkan para pemilih pemula untuk dapat melakukan pendalaman pemahaman yang mereka dapatkan dari sekolah dan keluarga dengan cepat. Hal ini dimungkinkan karena berbagai informasi yang dibutuhkan mereka senantiasa tersedia sehingga mereka tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan jawaban maupun tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan mereka akan fenomena politik. Hal ini kemudian memberi pengaruh pada sikap politik mereka.

Dengan informasi yang didapatkan dengan cepat dan beragam, maka pada satu sisi media sosial memberikan pengaruh yang positif pada upaya pembentukan preferensi berdasarkan input-input tersebut. Beragam informasi memungkinkan mereka untuk dapat menimbang dan mencermati lebih jauh berbagai pilihan yang mungkin akan mereka pilih sebagai landasan perilaku politiknya. Hal ini memungkinkan memunculkan pemilih pemula yang memasuki ruang haknya untuk terlibat dalam politik dengan lebih siap. Namun pada sisi lain juga terdapat kecenderungan bahwa cepatnya arus informasi serta beragamnya bentuk yang disediakan oleh media sosial nampaknya juga membawa kesulitan tersendiri bagi para pemilih pemula terutama dalam menentukan landasan yang paling tepat diantara berbagai pilihan tersebut. Hal ini menjadikan peran orang tua tetap penting dalam proses pembentukan preferensi mereka meski bukan lagi menjadi satu-satunya sumber justifikasi dan pembenaran alasan atas pilihan preferensi tersebut.

Pada kondisi yang terakhir tersebut, pemilih pemula yang memiliki orang tua dengan latar belakang politik yang baik melalui pemahaman maupun

keterlibataa mereka pada ruang-ruang politik praktis akan menjadi aspek yang sangat membantu para pemilih pemula. Pemahaman yang cukup atas politik akan menjadi salah satu factor yang mendorong pemilih pemula untuk dapat menentukan sikap diantara berbagai pertanyaan dan kegamanagan sikap dan pilihan. Dalam hal ini, latar belakang orang tua atau keluarga seperti itu memberikan bantuan untuk membantu pemilih pemula dalam menetapkan sikap diantara berbagai pilihan yang mungkin diambil. Hasil sebaliknya terjadi pada pemilih pemula dengan latar belakang orang tua atau keluarga tanpa pemahaman politik yang kurang memadai. Pemilih pemula pada posisi ini akan cenderung berupaya untuk menemukan pembenaran atau untuk mendukung pilihan sikapnya dari luar keluarganya. Hal ini mendorong mereka untuk mencari sumber tersebut diantara pilihan-piliha yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Hal ini kemudian mendorong media sosial sebagai aspek penting sebagai alasan ataupun factor pembenaran dari sikap yang dipilihnya. Dengan demikian preferensi politik mereka akan cenderung berbeda dengan orang tua dan cenderung membentuk suatu sikap sendiri dengan menimbang berbagai informasi berdasarkan pembenaran-pembenaran yang dirasakan sesuai oleh logika awal politiknya.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan preferensi politik kalangan pemilih pemula nampaknya mendapat pengaruh besar dari kehadiran media sosial yang massif dewasa ini. Memang sebagai pemilih pemula dengan status sebagai pelajar pada sekolah menengah atas, pemahaman awal terkait dengan politik dalam hal hak dan kewajiban warga negara banyak dipengaruhi oleh proses Pendidikan dan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Namun hal tersebut nampaknya hanya menjadi titik awal pengenalan pada ruang politik saja. Hal ini karena pelajaran yang diterima belum secara mendalam memberikan informasi dan gambaran tentang ruang politik terutama dalam konteks praktis. Hal ini menjadikan upaya untuk membentuk preferensi politiknya membutuhkan upaya dan informasi-informasi lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, peran orang tua dan keluarga pada awalnya memegang peranan yang sangat penting dalam menatangkan pembentukan referensi politik pemilih pemula. Namun dewasa ini, kehadiran media sosial yang menyediakan informasi yang beragam dan tak terbatsa terkait ruang politik menjadikan para pemilih pemula memanfaatkannya sebagai salah satu aspek penting sumber pasokan informasi bagi mereka. Kecepatan respon infromasi, serta ketersediaan beraga informasi yang terkadang tidak tersedia dari informasi orang tua maupun keluarga menjadikan pemilih pemula sanhgat mengadalkan media sosial. Meski tidak menghilangkan pengaruh orang tua dan keluarga secara penuh, namun kehadiran media sosial cenderung menjadi sumber pembenaran preferensi politik pemilih pemula. Ruang yang dinamis dengan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai pilihan sikap maupun pertanyaan secara luas dengan potensi respon yang juga beragam menjadikan media sosial cenderung

dijadikan aspek penting bagi pemilih pemula. Hal ini bahkan tetap eksis meski para pemilih pemula memiliki orang tua atau keluarga dengan latar belakang pemahaman yang baik pada politik. Pada kondisi ini orang tua tetap menjadi salah satu sumber pembenaran, namun hal tersebut pada dasarnya tidak menghilangkan posisi media sosial. Pemilih pemula biasanya meminta masukan orang tua untuk membantu mereka dalam menentukan pilihan diantara beberapa prospek preferensi politik yang mereka pikirkan dimana Sebagian besar informasi mereka dapatkan sebelumnya dari media sosial.

Berbagai kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan kondisi bahwa pemilih pemula yang mengakses media sosial kemudian membahas politik dengan orang tua dan keluarga serta mencoba melakukan hal-hal terkait di sekolah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibanding mereka yang tidak. Hal ini karena mereka mendapatkan sumber pembenaran preferensi yang lebih lengkap terkait dengan konteks sosial budayanya. Sumber informasi dari media sosial memang memegang peranan penting dewasa ini, namun kehadiran informasi dari orang tua dan kegiatan sekolah yang relevan telah cukup melengkapi sumber preferensinya. Dengan demikian mereka akan cenderung lebih siap untuk memasuki ruang partisipasi politik pertamanya dalam pemilu.

Persantunan

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Hasanuddin melalui LP2M yang memberikan dana bagi penelitian yang menjadi bahan bagi tulisan ini. Hal ini telah memungkinkan adanya upaya diseminasi atas temuan penelitian kami sebagai bagian dari upaya penyebaran nilai-nilai positif ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan fenomena pemilih pemula. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Departemen Ilmu Politik Unhas yang telah membantu untuk memfasilitasi diseminasi awal dari temuan penelitian yang akhirnya menjadi masukan bagi penyempurnaan tulisan ini. Pada akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terutama sekolah-sekolah yang telah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara dengan para siswanya yakni SMAN 1 Makassar, SMAN 2 Makassar, SMAN 6 Makassar, SMAN 9 Makassar, SMAN 10 Makassar, SMAN 21 Makassar, SMA Islam Athirah, SMA YP PGRI 3 Makassar, Pesantren Darul Ulum. Kami berharap tulisan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.

Referensi

- Pemula di Pemilu (2019). Diakses tanggal 21 Januari 2021 dari <https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019>.
- Azmi, Shofiyatul. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial,

- Susila, dan Makhluk Religi. LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Volume. 18, Nomor 1, 77-86
- Biswas, A., Ingle, N. & Roy, M. (2014). Influence of sosial media on voting and behaviour. *Journal of Power, Politics & Governance* 2(2), 127-155.
- Briggs, J. (2016). *Young people and political participation: Teen players*. London: Springer.
- Dahl, Robert A. (1989). *Democracy and its critics*. New Haven: Yale University Press.
- Galstyan, Marina. (2019). Youth Participation. Literature review. Youth Partnership. The European Commission and the European Union-Council of Europe youth partnership.
- Greenstein, Fred. I. (1975). *Personality and Politics*. dalam Fred. I. Greenstein and Nelson W. Polsby. *Handbook of Political Science: Micropolitical theory*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Hemafitria dan Hadi Rianto. (2015). Pembelajaran PKN sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Edukasi*. Vol 13, No. 2, 175-189
- Hidayati, Siti Nurlaela dan Triwahyuningsing. (2014). Peran PKN dalam Menumbuhkan Budaya Politik Siswa di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. *Jurnal Citizenship*. Vol. 3 No. 2, 155-164
- Hooghe, M., and Bădescu, G. (2007). Parental Influence on Adolescents ' Political Participation.
- Kuntowijoyo. (1994). *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Mahmood, S., and Abdul Ghafoor Awan. (2019). Role of Media in Activation of Youth in Politics: A Case Study of District Khanewal. *Global Journal of Management, Sosial Sciences and Humanities*, 718 Vol 5. (4), 718-742.
- McIntosh, H., Hart, D., & Youniss, J. (2007). The Influence of Family Political Discussion on Youth Civic Development: Which Parent Qualities Matter? *PS: Political Science & Politics*, 40(03), 495-499.
- Mhlomi, Yolisa and Oluyinka Osunkunle. (2017). Sosial Media and Youth Political Participation in South Africa's 2014 General Election. *Communitas* 2017/22, 149-158
- Priyatno, Hary dan Nana Noviana. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Volume 4 No. 1, 1-9
- Rahman, Asmika. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol.10. No. 1, 44-51
- Sen, Amartya. (1999). Democracy as a Universal Value. *Journal of Democracy* 10.3, 3-17.

- Serrat, O. (2010). *Culture theory*. Washington, DC: Asian Development Bank.
- Somerville, Peter. (2011). *Democracy and participation*. *Policy & Politics*. Vol 39, no 3, 417-37.
- Sukri., Yunus, A., Ekawaty, D. (2021). "The Forming of First-time Voters' Political Preference in Indonesia", *Youth Voice Journal*, 1-18.
- Wildavsky, Aaron. (1987). *Choosing Preferences by Constructing Institutions: A Cultural Theory of Preference Formation*. *The American Political Science Review*, Vol. 81, No. 1, 3-22.